

Kerusakan Lingkungan Dalam Kegiatan Peningkatan Produktivitas Manusia Sebagai Tantangan Pemerintah Daerah

M. Awaluddin dan Rahmad Hidayat
Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat-Indonesia
awaldompu@gmail.com

Abstrak

Pada era globalisasi saat ini, peningkatan produktivitas sebuah negara bergantung pada pengembangan dan perbaikan sumberdaya manusia yang ada di dalamnya. Peningkatan produktivitas manusia harus di dukung oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang dasar 1945 bahwa pemerintah harus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang mengimplementasikan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, sehingga daerah tersebut dapat mengelola sumberdaya yang ada di dalamnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah tersebut. Peningkatan produktivitas manusia di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberikan bantuan moril dan materil baik di sektor infrastruktur maupun memberikan penyuluhan di bidang pertanian. Permasalahan yang timbul dalam peningkatan produktivitas manusia adalah munculnya masalah baru yang menjadi masalah serius yang di hadapi oleh pemerintah daerah, salahsatunya adalah kerusakan lingkungan akibat dari program pembangunan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat lokal tidak bisa berkelanjutan atau tidak sustainable. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu, observasi, kajian pustaka, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang terintegrasinya kinerja antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait pelaksanaan program peningkatan produktivitas manusia sehingga kurang memperhatikan keberlanjutan dari pelaksanaan tersebut, menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga menimbulkan kerugian dan masalah baru bagi masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Kerusakan Lingkungan, Produktivitas, Manusia, Daerah

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, peningkatan produktivitas sebuah negara bergantung pada pengembangan dan perbaikan sumberdaya manusia yang ada di dalamnya. Peningkatan produktivitas manusia harus di dukung oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang dasar 1945 bahwa pemerintah harus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang mengimplementasikan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, sehingga daerah tersebut dapat mengelola sumberdaya yang ada di dalamnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah tersebut. Peningkatan produktivitas manusia di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberikan bantuan moril dan materil baik di sektor infrastruktur maupun memberikan penyuluhan di bidang pertanian.

Permasalahan yang timbul dalam peningkatan produktivitas manusia adalah munculnya masalah baru yang menjadi masalah serius yang di hadapi oleh pemerintah daerah, salahsatunya adalah kerusakan lingkungan akibat dari program pembangunan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat lokal tidak bisa berkelanjutan atau tidak sustainable (Budiman, Arif. 2000:7).

Pada dasarnya pembangunan masyarakat agar mendapatkan produktivitas yang tinggi harus mengandung 3 unsur yaitu adanya proses perubahan, mobilisasi sumberdaya dan pengembangan kapasitas masyarakat. Tiga hal tersebut harus di laksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan faktor lingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Perhatian pemerintah daerah pada lingkungan perlu dilakukan agar program atau kebijakan yang meningkatkan produktivitas manusia di daerah dapat terwujud dan tidak menimbulkan masalah baru (Soetomo 2006:40).

Kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah dalam memperbaiki produktivitas masyarakat terjadi pada sektor pertanian dan perkebunan serta pertambangan. Ketiga sektor tersebut

memberikan kontribusi besar dalam peningkatan produktivitas masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah maupun masyarakat lokal untuk meningkatkan produktivitasnya memanfaatkan tiga sektor tersebut, pemanfaatan secara besar-besaran membuat pemerintah daerah cenderung kurang memperhatikan kearifan dan keadaan lingkungan.

Ada beberapa permasalahan yang terjadi di daerah terkait pembangunan dan pengembangan daerah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat lokal di antaranya terjadinya abrasi pantai, kerusakan lingkungan hutan, dan terjadinya kebakaran lahan dan hutan di pulau sumatra dan kalimantan. Sebagai contoh Luca Tacconi dari Center for International Forestry Research (Cifor) tahun 2003, melaporkan kebakaran hutan Indonesia pada 1997-1998 yang menghancurkan 11,7 juta hektar lahan menimbulkan kerugian 2,3 miliar dollar AS-3,2 miliar dollar AS. Kerugian itu mencakup kerusakan pada lahan, hutan, bangunan, biaya pengendalian kebakaran, serta kerugian akibat dampak pada pariwisata, transportasi, dan terutama kesehatan. Kebakaran lahan dan hutan yang sering terjadi di Indonesia yang bukan hanya berdampak buruk pada lingkungan tetapi juga pada aspek kehidupan masyarakat. (Sari, Mela 2017).

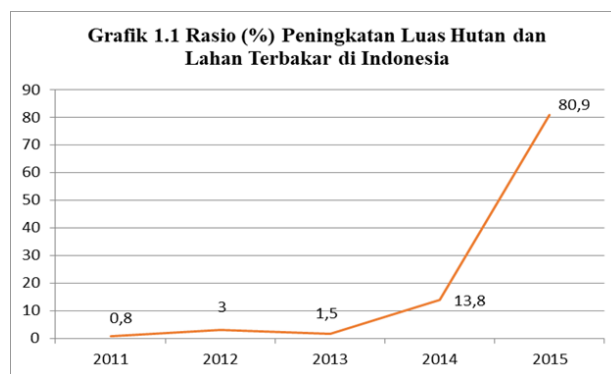


Figure 1. Peningkatan luas hutan dan lahan terbakar di Indonesia
Sumber: Sipongi.menlhk.go.id

Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan masyarakatnya bisa saja berada dalam sebuah proses menjadi miskin. Begitu juga dengan Indonesia yang sudah menerapkan otonomi daerah, maka daerahlah yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya di daerah tersebut baik itu manusia ataupun sumberdaya alam yang ada di dalamnya. Bisa saja, produktivitas dan pembangunan yang tinggi tidak mempedulikan dampak lingkungannya. Lingkungan semakin rusak, sumber-sumber alamnya terkuras sementara kecepatan bagi alam untuk melakukan rehabilitasi lebih lambat daripada kecepatan perusakan alam terbut.

Kabupaten Dompu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Dompu. Kabupaten ini berada di bagian tengah Pulau Sumbawa. Wilayahnya seluas 2.321,55 km² Dompu terkenal sebagai penghasil susu kuda liar dan madu. Hampir 90% masyarakat Kabupaten Dompu berprofesi sebagai petani, sehingga Pemerintah Kabupaten Dompu memberikan dukungan dan bantuan kepada seluruh petani di Kabupaten Dompu dengan membuat program penanaman jagung kepada seluruh petani dengan memberikan bantuan berupa pupuk, bibit serta membebaskan petani untuk menanam jagung seluas-luasnya agar mendapatkan hasil memuaskan.

Selain memanfaatkan daerah sebagai penghasil di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas masyarakat lokal pemerintah daerah juga memberikan ijin pada sektor pertambangan untuk melaksanakan eksplorasi oleh PT. Sumbawa Timur Mining (STM) di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dengan total luas eksplorasi sejak tahun 2012 seluas 19. 200 Ha dengan total 80 titik bor dan perusahaan pasir besi di Kecamatan Pekat. Dengan beberapa program pemerintah daerah dan Pemerintah Kabupaten Dompu tentu memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat lokal sehingga memperoleh kesejahteraan. Tetapi dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Dompu masih kurang memperhatikan pembangunan yang

berkelanjutan (Sustainable Development). Dari pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Dompu memang meningkatkan produktivitas dan penghasilan masyarakat lokal tetapi menimbulkan permasalahan seperti kerusakan hutan, tercemarnya lingkungan dan terjadinya banjir.

Selain di daerah yang mengandalkan sektor pertanian, pertambangan dan perkebunan kurang memperhatikan lingkungan kota-kota besar yang ada di pulau Jawa yang membangun pusat perbelanjaan serta pabrik masih kurang memperhatikan dampak lingkungan dari pembangunan, mungkin saja pabrik-pabrik yang di dirikan menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Oleh karena itu, seringkali terjadi pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian lingkungan yang memadai. Akibatnya pembangunan yang dilaksanakan daerah tersebut tidak berkelanjutan atau sustainable. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan pemerintah tidak hanya memikirkan saat sekarang tetapi juga harus memikirkan di masa yang akan datang, bagaimana dengan 10 atau 20 tahun kedepan, jangan sampai merugikan lebih besar di banding yang diperoleh saat ini. (Budiman, Arief, 2000:6).

Salah satu contoh limbah pabrik yang mencemari lingkungan ada di Kabupaten Pekalongan, limbah milik home industri (industri rumahan) bekas cucian batik langsung di buang ke sungai, karena masyarakat tidak mampu membeli pipa dan membangun tempat pembuangan limbah batik karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Limbah batik yang di buang langsung ke sungai oleh pengusaha UMKM batik pekalongan membuat air sungai menjadi berwarna dan berbau. Air tidak bisa digunakan serta flora dan faunanya tidak bisa di manfaatkan lagi oleh masyarakat pekalongan. Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar bisa mengatur dan mencari solusi sehingga proses peningkatan produktivitas masyarakat tidak merusak lingkungan dan mendatangkan permasalahan yang baru.

Berangkat dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk membuat makalah terkait tantangan lingkungan yang perlu di perhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah di samping membuat program atau kebijakan yang akan meningkatkan produktivitas manusia (masyarakat Indonesia) sehingga tidak terjadi masalah kerusakan lingkungan yang merugikan serta meresahkan masyarakat di waktu yang akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong, Harbani (2011:7), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana Sumber Daya dan personel Publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam Kebijakan Publik.

Konsep Administrasi Publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi Publik sudah ada sejak dari dulu, hanya para pakar yang mengganti istilah Administrasi Publik menjadi Administrasi Negara. Begitu pula buku-buku asing misalnya yang berjudul "Public Administration" diganti menjadi Administrasi Negara. Jika ada para pakar yang mengatakan bahwa Administrasi Negara perlu direformasi menjadi Administrasi Publik, maka itu dapat dikatakan kesalahan berfikir, karena Administrasi Publik sudah ada sejak dari dulu. (Pasolong, 2012:55).

George J. Gordo dalam Inu Kencana, (51:2015) Administrasi Publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses yang baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta peradilan. Administrasi Publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responabilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.

Beberapa definisi Administrasi Publik yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dipahami bahwa Administrasi Publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah Daerah dalam peningkatan produktivitas manusia sangat penting karena telah di amanatkan dalam pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Karena dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah di harapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai program peningkatan produktivitas masyarakat di daerah di lakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan peluang bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Salahsatunya adalah pemberian dana desa dan program keluarga harapan, serta pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berbagai wilayah di Indonesia telah mengembangkan wilayah atau daerahnya sesuai dengan potensi sumberdaya masing-masing daerah. Di Kota-kota besar di Indonesia berkembang dengan sektor perdagangan dan pariwisatanya, sedangkan di daerah terpencil dan kota-kata kecil mengandalkan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan pariwisata.

Pemerintah daerah memanfaatkan potensi daerahnya secara besar-basaran seperti menerima penanam modal asing dan mberdayakan UMKM. Hal tersebut tentunya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. Dalam pemanfaat sumberdaya yang ada di daerah saat ini, pemerintah dan masyarakat di daerah cenderung tidak memperhatikan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan produktivitas masyarakat daerah. Kerusakan lingkungan biasanya kurang di sadari oleh masyarakat sebelum kerusakan itu membawa masalah baru dan merugikan masyarakat. seperti kerusakan lingkungan dan kawasan hutan di Kabupaten Bungo dan merabas hutan dengan cara membakar sehingga menimbulkan asap dan udara yang tercemar dan membawa dampak timbulnya penyakit gangguan pernapasan. Kabupaten Pekalongan yang menghasilkan limbah batik dari UMKM yang tidak memiliki pembuangan akhir melalui pipa agar tidak mencemari lingkungan.

Pengusaha UMKM yang memproduksi batik di pekalongan membuang sisa limbah batiknya di aliran sungai karena tidak memiliki pipa dan zat kimia yang bisa mengubah limbah batik agar tidak berbahaya. UMKM beralasan bahwa harga pipa pembuangan dan zat kimia yang mahal membuat pengusaha UMKM tidak mampu untuk membeli pipa dan tempat penampungan limbah batik tersebut. Berbagai permasalahan yang terjadi di daerah tersebut telah mendapatkan perhatian pemerintah. Pemerintah daerah memberikan sosialisasi agar kegiatan yang merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat di masa depan harus di tinggalkan karena pembangunan harus berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan.

Pada kenyataannya pemerintah daerah hanya memberikan sosialisasi tanpa ada tindakan nyata dan bantuan yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah tersebut. Masyarakat mengetahui bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan tetapi karena tidak ada pilihan yang tepat serta komunikasi yang efektif tidak berjalan antara pemerintah dan masyarakat serta solusi yang diberiksn hanya dalam bentuk pengarahan dan himbauan menyebabkan masyarakat tetap memilih merusak lingkungan sehingga membawa masalah di masa yang akan datang.

Kurang terintegrasinya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam bentuk mencari solusi dan di implementasikan serta di berikan pengawasan sehingga peningkatan produktivitas manusia tidak menimbulkan dampak lain yang membawa masalah baru dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah harus memiliki strategi yang memecahkan masalah kerusakan lingkungan, misalnya dengan bekerjasama dengan sektor swasta atau dengan mengelola pendapatan daerah untuk diarahkan ke perbaikan lingkungan yang rusak serta meminta sumbangsih dari sektor swasta untuk membantu masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan.

Pemerintah, masyarakat dan sektor swasta menjadi tiga hal penting untuk kemajuan negara. Komunikasi yang efektif terintegrasi dan tindakan nyata tentu diperlukan oleh tiga sektor tersebut.

Permasalahan kerusakan lingkungan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah saat ini untuk mewujudkan produktivitas atau pembangunan manusia daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah harus mengembangkan strategi kebijakan lingkungan dan memberikan kontribusi yang nyata dalam melibatkan sektor swasta. Pemerintah daerah harus memanfaatkan pajak pengusaha dan mendampingi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang efektif tetapi tidak merusak agar peningkatan produktivitas manusia di daerah tidak menimbulkan masalah lingkungan.

SIMPULAN

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah di harapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai program peningkatan produktivitas masyarakat di daerah di lakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan peluang bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Salahsatunya adalah pemberian dana desa dan program keluarga harapan, serta pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kurang terintegrasinya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam bentuk mencari solusi dan di implementasikan serta di berikan pengawasan sehingga peningkatan produktivitas manusia tidak menimbulkan dampak lain yang membawa masalah baru dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah harus memiliki strategi yang memecahkan masalah kerusakan lingkungan, misalnya dengan bekerjasama dengan sektor swasta atau dengan mengelola pendapatan daerah untuk diarahkan ke perbaikan lingkungan yang rusak serta meminta sumbangsih dari sektor swasta untuk membantu masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan. Pemerintah, masyarakat dan sektor swasta menjadi tiga hal penting untuk kemajuan negara. Komunikasi yang efektif terintegrasi dan tindakan nyata tentu diperlukan oleh tiga sektor tersebut.

Daftar Pustaka

- Kencana Syafiie, Inu. (2015). Ilmu Administrasi, Cetakan ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santosa, Pandji. (2008). Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance, cetakan ke-1, Bandung Refika Aditama, PT.
- Febri (2016) Dampak pembuangan limbah di Kabupaten Pekalongan, Semarang: Undip
- Sari, Mela (2017) Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi (kajian Peraturan Bupati Bungo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pos Komando Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Kabupaten Bungo), Semarang Undip:2017
- Awaluddin, M. (2017) Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor. 06 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan, Semarang Undip:2017
- Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Undang-Undang-No-23-Th-2014 tentang penyelenggaraan Pemerintahan-Daerah